



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Intervensi Federasi Rusia ke Republik Georgia sebagai
Upaya untuk Mempertahankan Hegemoni Regional

Skripsi

Oleh

Stella Marsella Nongka

2016330091

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Stella Marsella Nongka
Nomor Pokok : 2016330091
Judul : Intervensi Federasi Rusia ke Republik Georgia sebagai
Upaya untuk Mempertahankan Hegemoni Regional

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 30 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

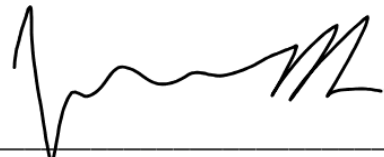
Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

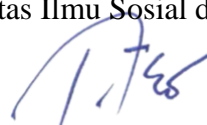
: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stella Marsella Nongka

NPM : 2016330091

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Intervensi Federasi Rusia ke Republik Georgia Sebagai
Upaya untuk Mempertahankan Hegemoni Regional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Juli 2020



Stella Marsella Nongka

2016330091

ABSTRAK

Nama : Stella Marsella Nongka

NPM : 2016330091

Judul : Intervensi Federasi Rusia ke Republik Georgia sebagai Upaya untuk Mempertahankan Hegemoni Regional

Negara memiliki hak kedaulatan untuk memerintah secara penuh dan bebas dari campur tangan pihak luar. Berdasarkan hukum internasional, hak kedaulatan sudah seharusnya di patuhi dan di hormati oleh seluruh negara. Namun, pada kenyataannya, Federasi Rusia telah melakukan intervensi atas wilayah Republik Georgia dan menyebabkan pecahnya Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008. Penelitian ini menjelaskan alasan yang melatarbelakangi intervensi Rusia ke Georgia. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan Realisme Ofensif yang berakar dari konsep Dilema Keamanan. Hegemoni regional merupakan tujuan negara untuk memaksimalkan kekuatannya dalam menghadapi ancaman-ancaman eksternal.

Penelitian ini menemukan dua faktor yang mendorong intervensi Rusia ke Georgia. Pertama, ambisi Georgia untuk bergabung ke dalam keanggotaan NATO dan Uni Eropa. Setelah berakhirnya Rose Revolution di tahun 2004, Georgia secara terbuka mendeklarasikan aspirasinya untuk bergabung ke dalam keanggotaan NATO dan Uni Eropa. Kedua, respon NATO terhadap pencalonan keanggotaan Georgia. Melalui konferensi NATO di Bukares, Amerika Serikat dan sekutu Eropa, memutuskan bahwa Georgia akan menjadi anggota resmi NATO di waktu yang akan datang. Pembahasan terkait pencalonan keanggotaan Georgia akan tetap diterima dan dianggap relevan oleh NATO.

Pencalonan Georgia di dalam keanggotaan NATO dan Uni Eropa merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan Rusia. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia telah mendeklarasikan penolakannya terhadap perluasan keanggotaan NATO dan Uni Eropa di kawasan Eropa Timur. Oleh karena itu, Moskow berusaha melakukan segala cara untuk mencegah terwujudnya pencalonan keanggotaan Georgia, yaitu dengan melakukan intervensi atas kedua wilayah separatisnya, Abkhazia dan Ossetia Selatan. Dalam pendekatan Realisme Ofensif, intervensi ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan hegemoni regional yang Rusia inginkan.

Kata Kunci: Intervensi, Federasi Rusia, Republik Georgia, Hegemoni, Regional

ABSTRACT

Name : Stella Marsella Nongka

NPM : 2016330091

Title : Intervention of the Russian Federation to the Republic of Georgia as an Effort to Defend Regional Hegemony

Countries have sovereign rights of its own and are free from outside interference. Under international law, the sovereign rights must be obeyed and respected by all countries. However, in the real situation, Russian Federation had intervened in the territory of the Republic of Georgia and caused the outbreak of the Five-Day War in August 2008. This study explains the reasons for the intervention carried out by the Russian Federation. This qualitative study uses the approach of Structural Realism or Offensive Realism which is rooted in the concept of Security Dilemma. Regional hegemony is the country's goal to maximize its power for countering external threats.

This research found two factors that drive Russia's intervention into Georgia. First, Georgia's ambition to join NATO and European Union membership. At the end of the Rose Revolution in 2004, Georgia openly declared its aspirations to join NATO and European Union membership. Second, NATO's response to Georgia's candidacy for membership. Through NATO's summit in Bucharest, the United States and its European allies, decided that Georgia would become an official member of NATO in the future. Discussions regarding Georgia's candidacy of membership will continue to be accepted and are considered relevant by NATO.

Membership candidacy of the Republic of Georgia in NATO and the European Union is a threat for the security and stability of Russia. Since the collapse of the Soviet Union, Russia has raised objections against that NATO and European Union intention. Therefore, Moscow does everything possible to prevent the intention of Georgia to join NATO and European Union by intervening in the two separate regions, Abkhazia, and South Ossetia. In the perspective of Offensive Realism, this intervention is an effort to maintain the regional hegemony sought by Russia.

Keywords: Intervention, Russian Federation, Republic of Georgia, Hegemony, Regional

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan seluruh proses penelitian ini dengan baik untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Negara memiliki hak kedaulatan untuk memerintah secara penuh dan bebas dari campur tangan pihak luar. Hak kedaulatan sudah seharusnya di patuhi dan di hormati oleh seluruh negara. Namun, pada kenyataannya, Federasi Rusia telah melakukan intervensi atas wilayah Republik Georgia dan menyebabkan pecahnya Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Federasi Rusia melakukan intervensi ke Republik Georgia.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih membutuhkan banyak perbaikan, baik secara teknis maupun substansi. Maka sekiranya, peneliti menyambut dengan baik segala kritik dan saran atau masukan agar dapat memperkaya penelitian ini. Di balik segala kekurangan, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung, 4 Juli 2020

Stella Marsella Nongka

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat karunia-Nya. Dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1. Mama Lis Suharni dan Papa Frans Nongka selaku orang tua peneliti yang telah memberikan doa, dukungan, hingga masukan tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kepada Kakak Ade Yasmin, Yoga Muatsar, Amanda Nongka, dan Moch Reza Rizky selaku kakak peneliti yang selalu memberikan semangat dari waktu ke waktu. Terima kasih banyak untuk keluargaku tersayang!
2. Mas Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A, Ph.D. selaku dosen pembimbing peneliti. Terima kasih sebesar-besarnya Mas Pur atas segala bimbingan, masukan, dan kritik yang telah diberikan selama hampir lebih dari satu tahun ini. Semoga Mas Pur selalu diberikan berkat dan perlindungan dari Tuhan. Sukses selalu ya Mas!
3. Bella Dominica. Sahabat sekaligus inspirasi peneliti sejak Semester 1 di perkuliahan ini. Terima kasih Bella telah menjadi sahabat terbaik yang tidak hanya selalu memberikan dukungan, melainkan kritik yang menguatkan. Semoga Bella tetap selalu menjadi terang bagi banyak orang ya Bell!
4. Antonia Levinda. Sahabat sekaligus mood booster-ku. Terima kasih Levin untuk segala dukungan dan doanya. Secara khusus, terima kasih atas setiap candaan dan tawaan di sela-sela menulis penelitian ini. Setiap pulang

bimbingan, selalu mampir ke rumah Levin untuk minum boba dan diselingi nonton series Thailand. Dengan kehadiran Levin, yang sulit menjadi semakin mudah untuk dilewati. Semoga Levin bahagia selalu ya! Khop Kun Ka!

5. Om Alex Sentoso, Tante Margaretha Djati Marlina, Kakak Claudius Grenadi Sentoso, Kakak Mireille Marcia Karman, dan G Grenaldo Sentoso. Keluargaku di Bandung, terima kasih om, tante, dan kakak-kakak semua atas segala dukungan dan doa yang tiada hentinya. Khususnya untuk G Grenaldo Sentoso, yang tidak pernah ada letih-letihnya untuk selalu menguatkan, terima kasih atas segalanya kak!
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv, Ukraina. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Duta Besar, seluruh Bapak Ibu Diplomat, *Home Staff*, *Local Staff*, karyawan, dan supir kedutaan yang telah menyambut peneliti dengan sangat baik selama satu bulan program magang di Kedutaan. Terima kasih atas seluruh masukan dan informasi yang membangun penelitian ini. Secara khusus, peneliti berterima kasih kepada Kak Patria Fathanputra dan Kak Moch Fahri yang telah menjadikan Ukraina seperti rumah kedua.
7. Wang Yi Bo dan Xiao Zhan. Dua lelaki yang selalu menjadi penyemangat setiap harinya. Di saat lelah dan jenuh dalam menulis, selalu teringat “Yibo dan Zhan Ge pasti lebih capek lagi, tapi mereka selalu kuat. Aku juga harus selalu kuat.” *Xie xie GGDD!*

Bandung, 4 Juli 2020

Stella Marsella Nongka

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR AKRONIM.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang Masalah	13
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.2.1 Pembatasan Masalah	17
1.2.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.3.1 Tujuan Penelitian	18
1.3.2 Kegunaan Penelitian	18
1.4 Kajian Pustaka	19
1.5 Kerangka Pemikiran	22
1.6 Metode Penelitian.....	27
1.6.1 Metode Penelitian	27
1.6.2 Jenis Penelitian.....	28
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
1.7 Sistematika Pembahasan	29
BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI FEDERASI RUSIA PASCA BERAKHIRNYA UNI SOVIET.....	30
2.1 Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia pada Masa Kepemimpinan Presiden Boris Yeltsin (1991-1999)	31
2.1.1 Pengaruh Pemikiran Baru Mikhail Gorbachev pada Awal Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia (1991-1993/1994)	31

2.1.2 Pendekatan Geopolitik sebagai Landasan dari Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia (1993/1994-2000)	33
2.2 Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia pada Masa Kepemimpinan Presiden Vladimir Putin (2000-2008)	34
2.2.1 Konsep Keamanan Nasional dan Konsep Kebijakan Luar Negeri sebagai Landasan Kebijakan Luar Negeri Presiden Vladimir Putin.....	35
2.2.2 Munculnya Pengaruh Kepentingan Ekonomi pada Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia	37
2.2.3 Membangun dan Mempertahankan Hegemoni Regional sebagai Prioritas Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia...	40

BAB III FAKTOR PENDORONG FEDERASI RUSIA MELAKUKAN INTERVENSI MILITER KE WILAYAH REPUBLIK GEORGIA

3.1 Keberpihakan Republik Georgia terhadap Barat.....	44
3.1.1 Kebijakan Pro-Western Presiden Republik Georgia Mikhail Saakashvili (2004).....	45
3.1.2 Aspirasi Republik Georgia untuk Bergabung Menjadi Anggota Uni Eropa dan NATO	48
3.1.3 Republik Georgia sebagai Buffer State Federasi Rusia	54
3.2 Kepentingan Barat di Eropa Timur	56
3.2.1 Perluasan Keanggotaan NATO dan Uni Eropa di Kawasan Eropa Timur	57
3.2.2 Tanggapan Negara-negara eks-Soviet atas Kepentingan Barat di Kawasan Eropa Timur.....	61
3.3 Intervensi Federasi Rusia sebagai Respon atas Keberpihakan Republik Georgia terhadap Barat dan Perluasan Keanggotaan NATO dan Uni Eropa.....	71
3.3.1 Ancaman Eksternal Federasi Rusia.....	72
3.3.2 Situasi Dilematis Federasi Rusia.....	74
3.3.3 Intervensi Militer Sebagai Strategi Ofensif untuk Mempertahankan Status Hegemoni Regional	76

BAB IV PENUTUP.....	79
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Teori dan Konsep Kerangka Pemikiran	22
------------------	--	-----------

DAFTAR AKRONIM

AA	: <i>Association Agreement</i>
BTC	: <i>Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline</i>
CIS	: <i>Commonwealth Independent States</i>
DCFTA	: <i>Deep and Comprehensive Free Trade Area</i>
EaP	: <i>Eastern Partnership</i>
EAPC	: <i>Euro-Atlantic Partnership Council</i>
ENP	: <i>European Neighbourhood Policy</i>
EU	: <i>European Union</i>
GAF	: <i>Georgian Armed Forces</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
ICBMs	: <i>Intercontinental Ballistic Missiles</i>
IPAP	: <i>Individual Partnership Action Plan</i>
ISAF	: <i>International Security Assistance Force</i>
JCC	: <i>Joint Control Commission</i>
KFOR	: <i>Kosovo Force</i>
MAP	: <i>Membership Action Plans</i>
NACC	: <i>North Atlantic Cooperation Council</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NPT	: <i>Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons</i>
NUC	: <i>NATO-Ukraine Commission</i>
OSCE	: <i>Organization for Security and Co-operation in Europe</i>
PARP	: <i>Partnership for Peace Planning and Review Process</i>

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCA : *Partnership and Cooperation Agreement*
PfP : *Partnership for Peace*
UNAMI : *United Nations Assistance Mission in Iraq*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki hak kedaulatan yang setara untuk memerintah secara penuh dan bebas dari campur tangan pihak luar. Asal usul konotasi kedaulatan pun berawal sejak fenomena disintegrasi feodalisme dari abad pertengahan dan dilanjutkan dengan lahirnya *Nation State* melalui Perjanjian Westphalia (1648).¹ Pada abad pertengahan, sistem feodalisme diartikan sebagai sistem yang tersegmentasi menjadi unit-unit teritorial ataupun lembaga otonom seperti; kerajaan, adipati, kota perdagangan, dan entitas politik lainnya. Lembaga-lembaga otonom tersebut memiliki pemerintahan “tumpang tindih” yang didasari oleh loyalitas dan kesetiaan ataupun sebatas kepentingan politik semata.² Sistem feodalisme tidak mengenal arti kedaulatan yang dianut oleh hukum internasional sekarang ini.

Pada tahun 1648, Perjanjian Westphalia melahirkan sistem *Nation State* atau Negara Bangsa yang menggantikan sistem sebelumnya yaitu feodalisme. Perjanjian tersebut melahirkan salah satu prinsip utama yang secara umum telah dianut di dalam hukum internasional secara fundamental. Bahwa semua negara memiliki hak kedaulatan yang setara (*Sovereign Equality*) untuk memerintah masyarakatnya secara penuh di wilayah teritorialnya, dengan bebas dari campur tangan pihak luar, baik terdapat klaim untuk campur tangan yang didasarkan pada

¹ Djura Ninčić, *The Problem of Sovereignty in the Charter and in the Practice of the United Nations*, (Leiden: Brill Archive, 1970)

² Charles Tilly, *The Formation of Nation-States in Western Europe*, (Princeton: Princeton University Press, 1975)

prinsip politik, hukum atau agama.³ Dalam sistem Negara Bangsa, negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Sebaliknya, negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain.⁴ Sebagaimana halnya Federasi Rusia dan Republik Georgia merupakan negara yang berdaulat sejak berakhirnya Perang Dingin di tahun 1991.

Di dalam hukum internasional, prinsip kedaulatan terkandung di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pasal 2 Paragraf (1), (4), dan (7). Pada Paragraf 1 dari Piagam PBB, tertulis bahwa *“The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.”*⁵ Prinsip kedaulatan menjadi dasar dari bagaimana PBB bekerja. Paragraf 4 tertulis bahwa:

“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”

Paragraf tersebut menegaskan bahwa kedaulatan suatu negara tidak dapat diganggu-gugat. Integritas teritorial ataupun kebebasan politik merupakan bagian dari kedaulatan negara itu sendiri. Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali prinsip menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan di dalam hubungan internasional. Kedua, Dewan menegaskan pentingnya menjalin hubungan yang baik dan tidak melakukan campur tangan atas kepentingan internal negara lain. Ketiga, ditegaskan pula bahwa Dewan tidak memperbolehkan dukungan atas

³ Stéphane Beaulac, “The Westphalian Model in Defining International Law: Challenging The Myth,” *Australian Journal of Legal History*, (2004), di akses 18 Febuari 2020, <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AJLH/2004/9.html#fn1>

⁴ Sigit Riyanto, “Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer,” di *Yustisia*, Vol. 1, No. 3, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), 7; Jens Bartelson, “The Concept of Sovereignty Revisited” di *European Journal of International Law*, Vol. 17, No. 2 (Oxford: Oxford University Press, 2006)

⁵ “Charter of The United Nations”, United Nations, 1945, di akses 18 Febuari 2020 <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>

kelompok-kelompok bersenjata yang mampu mengancam kestabilan internasional dan meminta negara untuk mundur dari wilayah yang di sengkatakan.⁶ Paragraf 7 dari Piagam PBB tertuliskan bahwa:

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”

Paragraf ini menegaskan prinsip non-intervensi yang di pandang sebagai cerminan dari prinsip kedaulatan itu sendiri. Prinsip non-intervensi diartikan bahwa negara yang berdaulat tidak diperbolehkan untuk ikut campur atas kepentingan internal negara lain.⁷ Paragraf 7 kembali menegaskan bahwa tidak ada di dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan kepada PBB untuk melakukan intervensi atas kepentingan internal negara mana pun. Kedaulatan merupakan dasar yang mengatur perilaku negara di dalam hubungan internasional.⁸ Maka dari itu kedaulatan sudah seharusnya dipatuhi dan dihormati oleh seluruh negara di dunia, sebagaimana telah terkandung di dalam hukum internasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada kenyataannya, pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara telah dilakukan oleh Federasi Rusia dengan melakukan intervensi militer ke wilayah Republik Georgia yang berdaulat pada Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008.

⁶ “Purposes and Principles of the Charter of the United Nations,” United Nations, di akses 10 Juli 2020, https://www.un.org/en/sc/repertoire/2010-2011/Part%20III/2010-2011_Part%20III.pdf

⁷ Zhang Naigen, “The Principle of Non-Interference and its Application in Practices of Contemporary International Law,” *Fudan Journal of the Humanities and Social Science*, No 9, 449-464, (2016)

⁸ Alex Ansong, “The Concept of Sovereign Equality of States in International Law” *di Gimpa Law Review*, Vol 2, No 1, (2016), di akses 10 Juli 2020, <https://ssrn.com/abstract=3171769>

Perang Lima Hari di mulai pada tanggal 7 Agustus 2008 dengan pengiriman pasukan udara dan darat Republik Georgia ke wilayah separatis Ossetia Selatan atas perintah Presiden Mikhail Saakashvili.⁹ Ossetia Selatan dan Abkhazia merupakan kedua wilayah yang ingin memisahkan diri dari Republik Georgia.

Penyerangan ini merupakan sebuah respon atas menguatnya hubungan Abkhazia dan Ossetia Selatan dengan Federasi Rusia sejak pengumuman pencalonan keanggotaan Republik Georgia di dalam NATO.¹⁰ Pada hari yang sama, Federasi Rusia mengirimkan pasukan tank-nya ke wilayah Tskhinvali, melakukan perlawanan atas pasukan Republik Georgia dengan persenjataan militer, dan memberikan pertolongan kepada penduduk Ossetia Selatan, yang sebagian besar telah memiliki *passport* kependudukan Rusia.¹¹ Moskow menjustifikasi bahwa intervensi dilakukan sebagai bentuk perlindungan warga negaranya yang berada di wilayah Ossetia Selatan.¹²

Federasi Rusia telah melakukan pelanggaran prinsip kedaulatan yang terkandung di dalam hukum internasional yaitu penggunaan kekuatan militer atas

⁹ C.J Chivers dan Ellen Barry, "Accounts Undercut Claims by Georgia on Russia War," *The New York Times*, 7 November 2008, di akses 10 Juli 2020, <https://www.nytimes.com/2008/11/07/world/europe/07georgia.html>; "Russian Forces Battle Georgians," *BBC*, 8 Agustus 2008, di akses 12 Februari 2020, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7550354.stm>; Anton Lavrov, "Timeline of Russian-Georgian Hostilities in August 2008" di *The Tanks of August* (Moskow: Centre for Analysis of Strategies and Technologies, 2019)

¹⁰ Chris Harris, "Europe's Forgotten War: The Georgia-Russia Conflict Explained a Decade on," *Euronews*, 7 Agustus 2008, di akses 10 Oktober 2019, <https://www.euronews.com/2018/08/07/europe-s-forgotten-war-the-georgia-russia-conflict-explained-a-decade-on>; John Mearsheimer, "Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault", *Foreign Affairs*, September 2014, di akses 3 Juni 2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault>

¹¹ *Ibid.*

¹² The Law Library of Congress, *Russian Federation: Legal Aspects of War in Georgia*, (Washington: The Law Library of Congress, 2008)

integritas teritorial Republik Georgia yang berdaulat.¹³ Intervensi Federasi Rusia telah melanggar hukum internasional Piagam PBB dari Pasal 2 Paragraf (4) dan (7) yang berisikan prinsip menahan diri dari penggunaan kekerasan atas teritori negara lain dan prinsip non-intervensi untuk tidak ikut campur atas kepentingan internal negara yang berdaulat.¹⁴ Dalam aspek hukum, pasukan militer Federasi Rusia tidak memiliki hak untuk berada di wilayah teritorial Republik Georgia, tanpa adanya persetujuan dari negara tersebut.¹⁵ Maka, penggunaan kekuatan militer Federasi Rusia di wilayah kedaulatan Republik Georgia merupakan sebuah bentuk agresi atau kekerasan yang melanggar prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi dari hukum internasional.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Di dalam penelitian ini, peneliti membatasi masa penelitian pada kurun waktu antara 2004-2008. Namun untuk mendapatkan gambaran komprehensif, penelitian ini melihat konteks politik keamanan Eropa Timur sejak tahun 1991 ketika Republik Georgia terbentuk pasca berakhirnya Uni Soviet. Tahun 2004 merupakan tahun di saat konflik di antara Federasi Rusia dan Republik Georgia mengalami peningkatan (eskalasi) dan berujung pada Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008.

1.2.2 Perumusan Masalah

¹³ Kristi Land, "Legal Aspects of the Conflict in Georgia and Post-Conflict Developments," Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook, 2008-2009, di akses 18 Febuari 2020, https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/468/Kristi_Land.pdf

¹⁴ "Charter of The United Nations", United Nations, 1945, di akses 18 Febuari 2020 <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>

¹⁵ Kristi Land, "Legal Aspects of the Conflict in Georgia and Post-Conflict Developments," Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook, 2008-2009, di akses 18 Febuari 2020, https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/468/Kristi_Land.pdf

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Apa faktor yang mendorong Federasi Rusia melakukan intervensi militer ke Republik Georgia pada Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008?”

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan Federasi Rusia melakukan intervensi ke Republik Georgia pada Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca khususnya mahasiswa yang tertarik pada isu politik dan keamanan internasional atau mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan yang mengambil KBI 1. Informasi yang diberikan pun secara komprehensif mengenai konflik yang terjalin di antara Federasi Rusia dan Republik Georgia. Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman terkait salah satu isu internasional yang mempengaruhi stabilitas perdamaian, baik secara regional maupun internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai alasan Federasi Rusia melakukan intervensi ke Republik Georgia dengan menggunakan pendekatan/konsep pemikiran dari berbagai ahli akademisi, khususnya pemikiran John Mearsheimer dalam pendekatan Realisme Ofensif. Di akhir, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk persyaratan dalam menempuh studi S-1.

1.4 Kajian Pustaka

Peneliti memaparkan beberapa pandangan dari para akademisi sebagai sumber referensi dan informasi dalam memahami keseluruhan kompleksitas yang melatarbelakangi Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008. Pertama, peneliti menggunakan tesis yang dituliskan oleh Anna Cherkasova dengan judul *War Initiation by Weaker Powers: Georgia-Russia War 2008*. Dengan studi kasus Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008, Cherkasova meneliti sejauh mana pengaruh dukungan Amerika Serikat dalam keputusan Republik Georgia, yang memicu perilaku agresif dari Federasi Rusia.¹⁶ Inisiasi perang oleh negara yang lebih “lemah” kerap kali dikaitkan adanya dukungan pihak ketiga di dalamnya. Amerika Serikat telah menjadi sekutu Republik Georgia dan hubungan keduanya menguat sejak tahun 2004. Amerika Serikat berkontribusi dengan memberikan bantuan, baik secara ekonomi, militer, dan dukungan diplomatik seperti keberpihakannya terhadap Republik Georgia di setiap perselisihan dengan Federasi Rusia.¹⁷ Namun, Cherkasova menemukan bahwa pengaruh Amerika Serikat tidak terlalu kuat untuk mendorong tindakan agresif Republik Georgia atas Ossetia Selatan. Bahkan, Amerika Serikat memperingatkan kepada Republik Georgia untuk tidak memulai perang yang tidak dapat dimenangkannya. Cherkasova menyimpulkan penelitiannya bahwa serangan Republik Georgia atas Ossetia Selatan merupakan keputusan rasional yang didasari oleh ancaman aneksasi Federasi Rusia atas kedua wilayah separatisnya.¹⁸

¹⁶ Anna Cherkasova, *War Initiation by Weaker Powers: Georgia-Russia War 2008* (Austin: University of Texas, 2010)

¹⁷ *Ibid.*, 74

¹⁸ *Ibid.*, 75

Kedua, peneliti menggunakan tesis yang dituliskan oleh Ali Wibowo Laksono dengan judul “Konflik Georgia dan Rusia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008”. Laksono membawa studi kasus Perang Lima Hari melalui sudut pandang Republik Georgia. Tesis ini menemukan dua tujuan dari provokasi yang dilakukan oleh Republik Georgia pada Perang Lima Hari. Pertama, untuk mempercepat pencalonan keanggotaan Republik Georgia di dalam NATO dan Uni Eropa. Hal ini dikarenakan tekanan yang besar dari Federasi Rusia terhadap Republik Georgia. Kedua, hubungan kedekatan di antara Republik Georgia dan Amerika Serikat menjadi temuan kedua dari tesis ini.¹⁹ Besarnya dukungan dan bantuan dari Amerika Serikat, mendorong Republik Georgia untuk memprovokasi Federasi Rusia. Namun, Laksono menemukan bahwa provokasi untuk keanggotaan NATO menjadi tidak rasional, karena apabila NATO membantu Republik Georgia dalam melawan Federasi Rusia, maka dapat dikatakan bahwa NATO melakukan perlawanan dengan Federasi Rusia. NATO memutuskan untuk tidak memperburuk hubungan diantara keduanya.²⁰

Ketiga, peneliti menggunakan jurnal yang dituliskan oleh Sangtu Ko dengan judul *Russia's Georgian War: An Extension of Power Transition Theory*. Pada studi kasus Perang Lima Hari, Ko menggunakan Teori Transisi Kekuatan untuk menentukan faktor yang melatarbelakangi intervensi Federasi Rusia. Menurut Teori Transisi Kekuatan, kekuatan Federasi Rusia menantang dominasi dari kekuatan Amerika Serikat di kawasan Eropa Timur. Federasi Rusia tidak melakukan konfrontasi secara langsung terhadap Amerika Serikat, namun Federasi

¹⁹ Ali Wibowo Laksono, *Konflik Georgia dan Rusia di Ossetia Selatan pada Bulan Agustus 2008*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

²⁰ *Ibid.*,

Rusia melakukan penyerangan atas negara yang didukung dan telah berpihak kepadanya.²¹ Ko menekankan bahwa Perang Lima Hari merupakan perang “hegemonic,” di mana Federasi Rusia menargetkan negara yang lebih dominan (Amerika Serikat), namun memutuskan untuk melakukan penyerangan atas negara yang lebih lemah (Republik Georgia).²² Intervensi merupakan cerminan dari ketidakpuasan Federasi Rusia atas pendistribusian kekuatan di dalam sistem internasional dan merupakan cerminan dari kepentingan Federasi Rusia untuk membangun kembali pengaruhnya di negara-negara eks Soviet.

Sumber pertama, *War Initiation by Weaker Powers: Georgia-Russia War 2008* oleh Anna Cherkasova, dengan studi kasus yang sama, memberikan gambaran yang berbeda melalui penekanan sudut pandang pengaruh Amerika Serikat dan negara sekutu Eropa lainnya di dalam konteks Perang Lima Hari. Sumber kedua, *Konflik Georgia dan Rusia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008* oleh Ali Wibowo Laksono, dengan studi kasus yang sama, memberikan gambaran yang berbeda melalui penekanan sudut pandang Republik Georgia dalam memprovokasi Federasi Rusia melalui Perang Lima Hari. Sumber ketiga, *Russia's Georgian War: An Extension of Power Transition Theory* oleh Santu Ko, memberikan penekanan yang berbeda melalui penggunaan Teori Transisi Kekuatan untuk menemukan faktor yang melandasi intervensi Federasi Rusia. Peneliti menggunakan ketiga sumber literatur ini sebagai referensi utama yang dapat mengarahkan pada jawaban dari pertanyaan penelitian (*research question*) dalam melihat

²¹ Santu Ko, “Russia’s Georgian War: An Extension of Power Transition Theory” *The Korean Journal of Area Studies*, Vol. 30, No. 2, (2012)

²² Ibid.,

kompleksitas maksud dan tujuan intervensi Federasi Rusia terhadap Republik Georgia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menyamakan pemahaman komprehensif antara peneliti dan pembaca dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka diperlukan kerangka pemikiran di dalam penelitian.²³ Peneliti menggunakan konsep **Dilema Keamanan** yang di perkenalkan oleh John Herz. Konsep Dilema Keamanan merupakan dasar logika dari pendekatan **Realisme Ofensif** oleh John Mearsheimer. Kerangka pemikiran ini didukung dengan penggunaan konsep-konsep pemikiran lainnya, yaitu **Intervensi**, **Great Powers**, **Hegemoni Regional** sebagai instrumen dari pendekatan Realisme Ofensif, dan konsep *Buffer Zone System*.

Tabel 1.1 Tabel Teori dan Konsep Kerangka Pemikiran

Teori/ Pendekatan	Konsep
Realisme Ofensif	Dilema Keamanan
	Intervensi
	Negara Adidaya (<i>Great Powers</i>)
	Hegemoni Regional
	<i>Buffer Zone System</i>

Kerangka pemikiran yang pertama adalah konsep '**Dilema Keamanan**'. Konsep ini diperkenalkan oleh John Herz di dalam tulisannya yang berjudul *Idealist Internationalism and the Security Dilemma*. Dilema Keamanan merupakan konsep penggambaran dilematis negara dalam menghadapi ancaman yang bersifat eksternal. Situasi dilema keamanan dapat terjadi apabila suatu negara berupaya

²³ Yosef Jabareen, "Building a Conceptual Framework: Philosophy, Definitions and Procedure" di *International Journal of Qualitative Methods* 2009.

untuk meningkatkan keamanan negaranya, namun mengakibatkan ketidakamanan di negara lain.²⁴ John Herz menambahkan 6 (enam) aspek Dilema Keamanan. Pertama, sumber utama dari dilema keamanan adalah anarki atau tidak adanya kekuasaan tertinggi. Kedua, ketidakpastian dan kekhawatiran negara-negara akan niat satu sama lain merupakan penyebab langsung dari dilema keamanan. Ketiga, *self-help* atau swadaya mendorong negara untuk berusaha keluar dari situasi dilematis, dengan meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin. Keempat, negara-negara yang berusaha memaksimalkan kekuatannya, memiliki kemungkinan untuk merugikan dirinya sendiri. Kelima, dilema keamanan dapat menyebabkan perang, namun tidak menjadi penyebab semua perang. Keenam, dinamika dari dilema keamanan adalah *vicious cycle*.²⁵

Dilema keamanan memiliki dua tahapan, yaitu Dilema Interpretasi dan Dilema Respon yang diperkenalkan oleh Ken Booth dan Nicholas Wheeler di dalam buku *The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics*. Tahap pertama, yaitu Dilema Interpretasi merupakan situasi dilematis yang dihadapi negara dalam menginterpretasi motif, intensi, dan kapabilitas dari negara lain. Dikarenakan sistem internasional yang anarki menyebabkan ketidakpastian dan mengharuskan negara untuk *self-help*, negara tidak dapat yakin 100% mengenai motif dan intensi negara lain, khususnya dalam meningkatkan kekuatannya.²⁶ Maka, negara harus memutuskan tujuan dari penggunaan militer, sebagai

²⁴ John Herz, "Idealist Internationalism and the Security Dilemma," di *World Politics*, Vol 2, No 2 : 157-180, (1950)

²⁵ Shiping Tang, "The Security Dilemma: A Conceptual Analysis," di *Security Studies*, Vol. 18 : 591, (2009), di akses 16 Juli 2020,

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09636410903133050>

²⁶ Ken Booth dan Nicholas Wheeler, *The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics* (Basingstoke: Palgrave, 2008), 4

pertahanan dan perlindungan negara (*defensive*) atau sebagai bentuk ofensif untuk mengubah status quo demi kepentingan nasional (*offensive*). Setelah Dilema Interpretasi terselesaikan, maka negara memasuki tahapan yang kedua atau tahap Dilema Respon. Negara harus menentukan respon dalam bereaksi. Jika dilema respon dilandasi oleh “kecurigaan yang salah” mengenai motif dan niatan negara lain, dan negara memutuskan untuk bereaksi secara militer, maka akan berisiko terciptanya hubungan permusuhan timbal balik (*mutual hostility*).²⁷

Kedua, peneliti menggunakan pendekatan **Realisme Ofensif** oleh John Mearsheimer di dalam bukunya yang berjudul *The Tragedy of Great Power Politics*. Konsep Dilema Keamanan merupakan dasar logika dari pendekatan Realisme Ofensif.²⁸ Sistem internasional yang anarki dan tidak adanya kepastian, mengharuskan negara untuk meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin dengan kecenderungan yang agresif (ofensif) untuk bertahan hidup. Mearsheimer memiliki pandangan bahwa “bentuk pertahanan yang terbaik adalah bentuk ofensif”.²⁹

Ketiga, peneliti menggunakan konsep **Intervensi**. Menurut Hedley Bull, intervensi adalah “campur tangan secara paksa oleh pihak luar atau pihak-pihak dalam lingkup yurisdiksi negara berdaulat.”³⁰ Menurut Lassa Oppenheim di dalam hukum internasional, intervensi adalah “campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap permasalahan dalam negeri untuk memelihara atau mengubah keadaan.”³¹ Secara umum, intervensi adalah pelanggaran dari kedaulatan negara.

²⁷ Ibid., 5

²⁸ John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W. Norton & Company, 2001), 85

²⁹ Ibid., 87

³⁰ Hedley Bull, “Introduction”, di *Intervention in World Politics*, (Oxford: Clarendon Press, 1984), 1-7

³¹ Hersch Lauterpacht, *International Law by L. Oppenheim*, (London: Longmans, Green & Co, 1955)

João Marques de Almeida di dalam jurnalnya yang berjudul *International Political Theory and the Issue of Legitimate Intervention*, mendeskripsikan legitimasi dari intervensi dengan teori-teori politik internasional. Menurut pemikir Realis, intervensi adalah sah untuk mempertahankan keamanan nasional ataupun untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional.³² Bagi pemikir Realis, intervensi militer pun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, ikut campur permasalahan internal suatu negara karena adanya kekhawatiran bahwa perkembangan di negara tersebut akan mempengaruhi keamanan negaranya sendiri. Kedua, negara ikut campur permasalahan internal suatu negara sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya.³³ Intervensi bagi Realisme adalah sah untuk mengutamakan keamanan negara di dalam sistem internasional yang anarki.

Keempat, peneliti menggunakan konsep Negara Adidaya atau *Great Powers*. Definisi dari konsep Negara Adidaya memiliki terminologi yang berbeda-beda. Namun, konsep Negara Adidaya kerap kali dikaitkan dengan besarnya kapabilitas militer yang dimiliki oleh suatu negara. Menurut Jack S. Levy, negara adidaya adalah “negara yang memiliki kemampuan militer yang relatif lebih besar daripada negara-negara lain.” Negara adidaya memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militer di luar perbatasan baik untuk melakukan militer ofensif ataupun defensif.³⁴ Suatu negara untuk dipandang dan diakui sebagai Negara Adidaya, harus memenuhi suatu indikator. Menurut David J. Singer, indikator tersebut adalah

³² João Marques de Almeida, “International Political Theory and the Issue of Legitimate Intervention,” di *Verão*, No, 102, Series 2 : 155-170, (2002), di akses 10 Juli 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/62685853.pdf>

³³ João Marques de Almeida, “International Political Theory and the Issue of Legitimate Intervention,” di *Verão*, No, 102, Series 2: 158 (2002), di akses 10 Juli 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/62685853.pdf>

³⁴ Jack S. Levy, *War in the Modern Great Power System: 1495-1975*, (Kentucky: The University Press of Kentucky, 1983)

“total populasi, produksi dan konsumsi sumber daya alam, dan militer.”³⁵ Meskipun tidak ada parameter yang signifikan, dapat diasumsikan bahwa semakin besar populasi, sumber daya alam, dan militer yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula peluang untuk memiliki status sebagai Negara Adidaya atau *Great Powers*.

Kelima, peneliti menggunakan konsep **Hegemoni Regional** yang merupakan instrumen dari pendekatan Realisme Ofensif. Hegemon pada hakikatnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *Hegemonia* yang berartikan dominasi atau opresi terhadap satu elemen dengan elemen lainnya.³⁶ Sebuah hegemon adalah negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu mendominasi seluruh negara di dalam sistem. Negara yang hegemon adalah satu-satunya ‘negara adidaya’ (*great powers*) di dalam sistem.³⁷ Sedangkan, ‘hegemoni’ merupakan dominasi terhadap sistem. Pada dasarnya hegemoni diartikan sebagai dominasi atas satu dunia (*global hegemons*), namun Mearsheimer berpendapat bahwa menjadi *global hegemon* tidak mungkin dapat dicapai. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan negara untuk mendominasi suatu kawasan (*regional hegemons*).

Di dalam sistem internasional yang anarki, menjadi hegemon regional merupakan cara yang terbaik untuk bertahan hidup.³⁸ Hegemoni Regional merupakan tujuan negara untuk memaksimalkan kekuatannya dalam menghadapi ancaman-ancaman eksternal. *Status quo* menjamin pendistribusian kekuatan di dalam sistem. Jika hegemon regional dihadapkan dengan lawan yang memiliki kekuatan yang sama, maka hegemon tersebut tidak lagi menjadi *status quo*. Oleh

³⁵ Ibid., 15

³⁶ Sait Yilmaz, “State, Power, and Hegemony” di *International Journal of Business and Social Science*. Volume 1. No. 3. Desember 2010.

³⁷ John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W. Norton & Company, 2001), 94

³⁸ Ibid., 95

karena itu, sebuah hegemon regional akan berusaha semaksimal mungkin untuk melemahkan ataupun menindas lawannya.³⁹

Keenam peneliti menggunakan konsep *Buffer Zone System* yang memenuhi beberapa kriteria yang mencakup sebagian maupun seluruhnya sebagai berikut:

- a. Fitur dari status *buffer* adalah terletak di antara dua kekuatan besar;
- b. Negara penyangga atau *buffer state* merupakan negara kecil yang mampu mengurangi konflik di antara kedua kekuatan besar yang bermusuhan/bertentangan;
- c. Negara penyangga atau *buffer state* merupakan status yang diberikan kepada negara-negara berbatasan dengan negara yang memiliki kekuatan lebih besar maupun negara adidaya, yang bertujuan memastikan keseimbangan di tingkat global dan regional⁴⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan beberapa konsep untuk mempertajam analisis. Pertama, konsep Dilema Keamanan, pendekatan Realisme Ofensif, konsep Hegemoni Regional, dan konsep *Buffer Zone System* untuk menjelaskan faktor pendorong intervensi Federasi Rusia ke Republik Georgia. Kedua, konsep Intervensi dan konsep Negara Adidaya sebagai instrument pendukung penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

³⁹ Ibid., 96

⁴⁰ Mohmamad Reza Hafeznia dan Bernard Hourcad, *Explanation of the Structural and Functional Characteristics of Geographical Buffer Spaces*, (Geopolitics Quarter, Volume: 8, No. 4, 2013)

Peneliti menggunakan metode kualitatif di dalam penelitian ini. Metode kualitatif merupakan metode yang menggunakan data-data primer dan data-data sekunder serta menggunakan pendekatan induktif. Data-data tersebut diperoleh secara langsung berdasarkan hasil wawancara dan sumber referensi dari website, buku, jurnal, surat kabar dan sumber-sumber lainnya.⁴¹

1.6.2 Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menekankan pada penelitian yang mendeskripsikan fenomena dari objek yang akan diteliti.⁴² Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisa alasan Federasi Rusia melakukan intervensi ke Republik Georgia pada Perang Lima Hari di bulan Agustus 2008.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara dan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk menganalisa alasan Federasi Rusia melakukan intervensi ke Republik Georgia. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber, buku, jurnal, dokumen resmi, dan teks yang berisikan data dan informasi. Pengumpulan data menggunakan akses secara langsung maupun secara digital melalui internet.⁴³ Wawancara dilakukan di bulan Februari 2020 dengan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv, Ukraina, ketika peneliti mengikuti program magang. Website resmi yang digunakan diantaranya adalah website Kepresidenan Negara yang berisikan dokumen-

⁴¹ Theresa Callan dan Lisa Harrison, *Key Research Concepts in Politics and International Relations: Methods*, (Florida: SAGE Publications, 2013)

⁴² Audie Klotz dan Deepa Prakash, *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*, (London: Palgrave Macmillan, 2008)

⁴³ Theresa Callan dan Lisa Harrison, *Key Research Concepts in Politics, and International Relations: Methods*, (Florida: SAGE Publications, 2013)

dokumen berupa pidato-pidato dari Presiden Federasi Rusia dan Republik Georgia. Teknik pengumpulan data ini mendukung metode kualitatif yang peneliti gunakan untuk menganalisa dan mengkaji penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Di dalam menganalisa alasan Federasi Rusia melakukan intervensi ke Republik Georgia, peneliti membahas penelitian ke dalam beberapa bab pembahasan yaitu:

Bab I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas kebijakan luar negeri Federasi Rusia pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin dan Presiden Vladimir Putin.

Bab III menganalisa faktor pendorong Federasi Rusia melakukan intervensi ke Republik Georgia, yang dibagi ke dalam beberapa sub bab pembahasan. Pertama, keberpihakan Republik Georgia terhadap Barat. Sub bab ini menjelaskan aspirasi Republik Georgia untuk bergabung ke dalam keanggotaan NATO dan Uni Eropa dengan menggunakan konsep *Buffer Zone System*. Kedua, kepentingan Amerika Serikat dan sekutu Eropa di kawasan Eropa timur. Sub ini menjelaskan kebijakan NATO dan Uni Eropa dan tanggapan dari negara-negara eks Soviet. Ketiga, faktor pendorong Federasi Rusia melakukan intervensi yang dianalisa dengan konsep Dilema Keamanan dan pendekatan Realisme Ofensif.

Bab IV merupakan kesimpulan dari seluruh analisa intervensi Federasi Rusia sebagai upaya mempertahankan hegemoni regional.

